

MAKALAH
POLITIK DAN AGAMA

Diajukan Untuk Ujian Akhir Semester Mata
Kuliah Lembaga – Lembaga Internasional

Dosen Pengampu:

Dr. H. Ija Sutana, M.Ag.



Disusun Oleh :

Sofa Nuraeni

1193030092

PRODI HUKUM TATA NEGARA SEMESTER VI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG 2022

Kata Pengantar

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua dan atas limpahan karunia serta rahmat nya kami dapat menyelesaikan Ujian Akhir Semester yang berjudul “Agama Dan Politik” ini. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga nya, sahabat nya, tabi’in dan tabi’at nya dan semoga sampai kepada kita semua selaku umat nya.

Dalam penulisan makalah ini kami sudah berusaha dengan sebaik-baik nya, tapi jika suatu saat di temukan kesalahan atau pun kekurangan kami memohon maaf, semoga dengan hal itu kami bisa menjadi lebih baik lagi kedepan nya. Dan terakhir semoga makalah ini bisa bermanfaat khusus nya bagi kami dan umum nya bagi kalian semua para pembacanya.

Bandung

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan.....	5
BAB II.....	6
PEMBAHASAN	6
A. Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Islam.....	6
B. Agama dan Politik.....	8
C. Islam di Indonesia	9
BAB III	10
PENUTUP	10
A. Kesimpulan.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal, agama membawa misi rahmatan lil alamin serta membawa konsep kepada ummat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem seperti konsep politik, perekonomian, penegakan hukum, dan sebagainya. Kemudian Dalam bidang politik misalnya, Islam mendudukannya sebagai sarana penjagaan urusan umat. Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (political behavior) serta budaya politik (political culture) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam Sikap dan perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam, menurut Taufik Abdullah, bermula dari suatu kepribadian moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam.¹

Islam meletakkan politik sebagai satu cara penjagaan urusan umat (ri'ayah syu-ÅQ - ummah). Islam dan politik tidak boleh dipisahkan, kerana Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Begitu pula politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, bahan, dan duniawi saja, kosong dari aspek moral dan spiritual. Oleh kerana itu, politik dalam Islam sangat penting bagi mengingatkan kemerdekaan dan kebebasan melaksanakan syariat Islam boleh diwadahi oleh politik.

Agama dapat didefinisikan sebagai suatu realisasi sosio-individu yang hidup (dalam ajaran, tingkah laku, ritus/upacara keagamaan dari suatu relasi dengan yang melampaui kodrat manusia (Yang Kudus) dan dunianya dan berlangsung lewat tradisi manusia dan dalam masyarakatnya. Realisasi sosio-individu yang hidup ini menciptakan suatu sistem yang mengatur makna atau nilai-nilai dalam kehidupan manusia yang digunakan sebagai kerangka acuan bagi seluruh realitas. Sementara itu, istilah politik dimaksudkan seperangkat makna atau nilai-nilai serta pilihan-pilihan yang diambil dari dalam masyarakat untuk membenarkan fungsi tatanan masyarakat yang berlaku. Nilai-nilai dan pilihan-pilihan itu terjadi bila dalam masyarakat terdapat ideologi dan hubungan kekuasaan yang menjamin efektivitasnya. Sedangkan ideologi dapat diartikan sebagai bentuk imajinasi sosial yang menerangkan eksistensi suatu masyarakat, cita-cita yang hendak diwujudkan

¹ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 31

serta mendorong ke arah tindakan (praksis). Pendidikan politik juga penting guna mempersiapkan masyarakat yang akan datang, bertujuan untuk membalikkan gelombang penurunan tingkat partisipasi politik dikalangan kelompok usia muda dan sekaligus membangun perkembangan sikap dan perilaku demokratis.² Fungsi ideologi telah memberi legitimasi tindakan-tindakan serta pilihan-pilihan dalam tatanan masyarakat, karena dalam setiap ideologi terkandung tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu nilai - nilai, kepentingan-kepentingan dan pilihan-pilihan. Pilihan dapat diubah menjadi kepentingan dan kepentingan dapat menjadi nilai. Pilihan dapat juga ditingkatkan pada status nilai untuk mencapai kepentingan. Baik agama maupun politik merupakan lembaga masyarakat yang menghasilkan nilai-nilai tertentu. Nilai agama yang diyakini bersumber dari Yang Kudus dijadikan kerangka acuan seluruh realitas (dunia maupun akhirat); sedangkan nilai-nilai dalam politik sebagai kerangka acuan untuk memfungsikan tatanan masyarakat. Nilai-nilai politik ini tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang menjadi sumber nilai dan cita-cita yang diaktualisasikan oleh lembaga-lembaga politik (partai, ormas). Oleh karena itu membicarakan hubungan antara agama dan politik sebagai sistem sosial selalu berkaitan dengan ideologi.

Ada dua hal yang bersifat kontradiktif dalam konteks hubungan politik antara Islam dan negara di negara-negara Muslim atau negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia. Kedua hal tersebut yakni; Pertama, posisi Islam yang menonjol karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk negara setempat. Kedua, sekalipun dominan Islam hanya berperan marjinal dalam wilayah kehidupan politik negara bersangkutan. Sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia, Islam telah menjadi unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam politik Indonesia. Namun demikian Islam hanya berperan marjinal dalam wilayah kehidupan politik nasional. Hal ini disebabkan karena dikotomi “politik islam” dan “non politik islam” dikalangan umat Islam Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepemimpinan dalam Islam?
2. Bagaimana agama dan politik?

² Ija Suntana & Betty Tresnawaty, “*Political Knowledge and Political Behavior among Highly Educated Muslims in Indonesia*”. *Journal of Social Studies Education Research*, Vol 11, No. 4 2020, hal. 150

3.. Bagaimana Islam di Indonesia?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui kepemimpinan dalam Islam
2. Untuk mengetahui agama dan politik
3. Untuk mengetahui Islam di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Islam

Islam mewajibkan atas seorang muslim supaya taat kepada Allah, Rasul-Nya dan mentaati pemimpin; pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah, akan tetapi ketaatan terhadap pemerintah (negara) bukanlah kewajiban taat yang mutlak tetapi ketaatan dengan syarat. Tidak akan ada ketaatan kepada pemimpin jika dapat membawa seorang muslim keluar dari mentaati Allah dan rasul-Nya. Dengan kata lain, Islam mewajibkan kepada tiap -tiap muslim untuk mendurhakai pemimpin (pemerintah dan penguasa-penguasanya) bila mereka melakukan perintah yang dapat membawa maksiat kepada Allah SWT.

Menjadi kewajiban setiap muslim untuk menetapkan kepemimpinan yang dapat mendorong pada pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Ibnu Taimiyah kepemimpinan merupakan bagian dari menunaikan amanat. Islam memiliki empat pasal dalam penetapan kepemimpinan. Pertama, memakai tenaga yang lebih patut (ashlah), maka menjadi kewajiban bagi pemimpin (pemerintahan) untuk menempatkan segala macam urusan kaum muslimin kepada orang-orang yang lebih patut/cakap untuk jabatan tersebut. Kedua, memilih yang lebih utama (Afdhal); jika tidak di dapat orang yang pantas untuk menduduki suatu jabatan tertentu, maka pilihlah orang yang lebih utama (afdhal) yaitu mereka yang afdhal dalam segala macam jabatan yang sesuai dengan orangnya, karena kekuatan dalam lapangan kepemimpinan haruslah menurut ketentuan bidangnya pula. Ketiga, amanah dan kekuatan yang jarang di temui pada seorang manusia. Dalam tiap-tia jabatan kepemimpinan perlulah menempatkan orang yang lebih cocok dengan kedudukannya. Artinya bila ternyata terdapat dua orang laki-laki satu diantaranya lebih besar "Amanah" dan lainnya lebih besar "kekuatan" maka haruslah diutamakan kemanfaatannya bagi bidang jabatannya dan yang lebih sedikit risikonya. Misalnya dalam suatu peperangan untuk jabatan pimpinan adalah orang yang kuat fisiknya dan berani meskipun ia fasik daripada orang yang lemah dan tak bersemangat sekalipun ia orang yang kepercayaan. Keempat, mengenal yang lebih maslahat dan cara kesempurnanya. Hal ini terkait dengan maksud/motif dan jalan/metode, artinya untuk mengenal mana yang lebih baik hanya dapat disempurnakan dengan menginsyafi maksud (motif) daripada pimpinan dan mengetahui pula jalan (metode) yang dimaksud.

Suatu hal yang tak terbantahkan bahwa dalam perspektif Islam tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Tuhan. Dengan menganggap semua kekuasaan itu relatif maka sistem politik yang sesuai dengan Islam tidak dapat menjelma sebagai teokrasi atau kerajaan/monarki yang berdasar hak Ilahi yang pernah terjadi di barat atau sebagai demokrasi parlementer. Ada dua alasan. Pertama; Al-Qur'an melarang kerajaan yang didasarkan atas hak Ilahi dan teokrasi yang dipakai orang di barat karena dalam Islam tak ada kaum Pendeta (Rahbaniah) dan tak ada gereja yang berhak untuk bicara dan memerintah atas nama Tuhan; khilafah tidak jadi turun temurun sebagai dinasti kecuali sesudah meniru otokrasi Romawi atau Persia. Kedua; Al-Qur'an tidak sesuai dengan demokrasi parlementer, karena persamaan yang ia tegakkan adalah persamaan antara mereka yang hidup bersama di bawah lindungan satu agama sementara parlementer didasarkan atas individualisme tanpa memperdulikan maslahat umat. Ketiga, Islam tidak memiliki konsepsi delegasi (perwakilan) dan pelimpahan kekuasaan yang melembagakan suatu perantara antara Tuhan dan Umat beragama. Di dalam literatur Abu A'la Maududi mengistilahkannya dengan theodemocracy untuk menyimpulkan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam yang berarti bahwa Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan demikian Islam menolak filsafat kedaulatan rakyat dan mengembangkan teori politik dan masyarakat politik yang bersandar pada kedaulatan Tuhan dan khilafah. Terdapat dua hal penting tentang hal tersebut, pertama, Islam menggunakan kekhilafahan bukannya kedaulatan, karena kedaulatan milik Tuhan dan siapapun yang memegang kekuasaan serta memerintah sesuai dengan hukum Tuhan merupakan khilafah dari penguasa tertinggi. Kedua, semua kaum beriman merupakan kekhilafahan yang merupakan kekhilafahan umum, setiap mukmin adalah khilafah Tuhan sesuai dengan kemampuan individunya. Sebagai suatu makna penting dari konsep tersebut dapat diperjelas bahwa dalam suatu masyarakat semua orang merupakan khalifah Tuhan, dimana semua menikmati status dan kedudukan yang sama, sementara kriteria superioritas terletak pada kemampuan dan karakteristiknya. Selain itu, ruang lingkup yang tak terbatas bagi pencapaian prestasi pribadi selalu menjadi tonggak suatu masyarakat Islam karena setiap orang akan menikmati peluang kemajuan yang disebabkan karena tingginya terhadap kemampuan. Kondisi tersebut menyebabkan tak ada ruang bagi kediktatoran seseorang atau kelompok tertentu, artinya seorang penguasa tidak mempunyai hak mutlak terhadap seseorang untuk merampas hak-hak asasi orang karena setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai implikasi penjelmaan dari kekhilafahan.

Pemimpin seperti dikenal dalam Islam ialah seorang khalifah yang mengatur umat, sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam mengatur dunia dan menegakkan agama dan mengatur dunia dengan agama itu, khalifah mengatur sendiri umat beserta orang yang menjadi wakilnya dalam menangani negara dan rakyat, atas pilihan dari rakyat atau dia sendiri yang menunjuk.. Menurut pandangan Al-Qur'an, bentuk pemerintahan yang benar adalah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasulullah yang menurut Al-Qur'an adalah undang-undang tertinggi yang bagi orang mukmin tidak ada pilihan lain kecuali patuh dan taat kepadanya.

B. Agama dan Politik

Politik adalah ilmu pemerintahan atau ilmu siyasah, yaitu ilmu tata negara. Pengertian dan konsep politik atau siyasah dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Ia merupakan sistem peradaban yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara bersamaan. Sejak Islam didirikan oleh Nabi Muhammad kondisi Mesir dan dunia Arab berada dalam lingkungan pemikiran Barat. Para tokoh sekuler hanya membatasi aktivitas agama sebatas dinding masjid dan menjadi urusan pribadi. Padahal pada dasarnya Islam adalah sistem yang sempurna.

Kesuksesan dakwah Rasulullah pun merupakan suatu implementasi dari strategi politik yang beliau rancang, bisa kita lihat mulai dari hijrah ke Madinah hingga puncaknya adalah Fathu Makkah (penguasaan Mekah). Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat bukannya mencoba lari dari intimidasi rezim kafir Quraisy, namun justru sebaliknya Rasulullah dan para sahabat melakukan konsolidasi politik yakni mulai dari membangun kekuatan politik internal hingga mengadakan koalisi politik dengan kaum Yahudi dan Nasrani melalui nota perjanjian Piagam Madinah. Beliau berpendapat bahwa politik adalah hal yang memikirkan tentang persoalan – persoalan internal maupun eksternal umat

Adapun yang dimaksud dengan politik sisi internal adalah mengatur roda pemerintahan, menjalankan tugas-tugasnya, merinci hak-hak dan kewajiban - kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik serta diluruskan jika kemudian mereka menyimpang. Sedangkan yang dimaksud dengan sisi eksternal politik menjaga adalah kebebasan dan kemerdekaan bangsa, menanamkan rasa

kepercayaan diri, kewibawaan, dan meniti jalan menuju sasaran - sasaran yang mulia, yang dengan cara itu bangsa akan memelihara harga diri dan kedudukan tinggi dikalangan bangsa-bangsa lain, serta membebaskan dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusanya dengan menetapkan pola interaksi bilateral maupun multilateral yang menjamin hak-haknya serta mengarahkan semua negara menuju perdamaian internasional yang peraturannya ini bisa mereka sebut Hukum Internasional.

C. Islam di Indonesia

Untuk mempelajari suatu agama, termasuk agama Islam harus bermula dari mempelajari aspek geografis dan geografi persebaran agama-agama dunia. Setelah itu dapat dipahami pula proses kelahiran Islam sebagai salah satu dari agama dunia, terutama yang dilahirkan di Timur Tengah, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiganya dikenal sebagai agama langit atau wahyu. Kedua hal itu, geografi persebaran dan persebaran agama itu sendiri. Selanjutnya untuk dapat memahami proses perkembangan Islam sehingga menjadi salah satu agama yang dianut oleh penduduk dunia yang cukup luas, harus dikenali lebih dahulu tokoh penerimaan ajaran yang sekaligus menyebarkan ajaran itu, yaitu Muhammad saw., sang pembawa risalah. Keberhasilan proses Islamisasi di Indonesia ini memaksa Islam sebagai pendatang, untuk mendapatkan simbol-simbol kultural yang selaras dengan kemampuan penangkapan dan pemahaman masyarakat yang akan dimasukinya dalam pengakuan dunia Islam. Langkah ini merupakan salah satu watak Islam yang pluralistis yang dimiliki semenjak awal kelahirannya.

Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para Tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia, ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat (eropa) yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahnya di Indonesia. Tokoh-tokoh itu diantaranya, Marcopolo, Muhammad Ghor, Ibnu Bathuthah, Deigo Lopez de Sequeira, Sir Richard Wainsted.³

³ Uka Tjandrasmita (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984) hlm, 74

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Reformasi agama dalam bidang politik mengarah pada perwujudan hubungan agama dan negara (politik) yang senantiasa mengalami kompromistis-kompromistis yang memungkinkan agama menjadi dasar religiulitas tidak hanya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tetapi juga dalam kehidupan negara. Meskipun demikian dalam Islam terdapat asas bahwa ada yang tidak boleh berubah dalam tempat maupun waktu, dan ada hal-hal yang bisa berubah dan boleh dirubah di dalam tempat maupun waktu.

Agama terlibat dengan ideologi pembangunan negara lewat pengejaran ketinggalan dalam iptek dan industrialisasi. Atas nama kepentingan umum/negara, pembangunan ekonomi di beri prioritas utama. Pembangunan politik (demokratisasi) diharapkan akan terwujud searah dengan naiknya keadaan perekonomian. Sementara itu kebijaksanaan pembangunan yang diatasnamakan kepentingan umum nasional selalu dikritik oleh pihak agama. Di lain pihak, kritik agama terhadap berbagai model pembangunan di dunia ketiga harus menghadapi kenyataan adanya kapitalisme dengan wajah baru lewat hadirnya perusahaan multi-nasional dengan kekuatan modal asing dan teknologinya ditambah ‘revolusi’ informatika dan transportasi. Akibatnya terjadi internasionalisasi dunia usaha dan nilai budaya. Lalu apa dan bagaimana yang dapat dilakukan agama dalam situasi demikian? Menghadapi situasi zaman yang ditandai dengan internasionalisasi kehidupan ekonomi dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat pascaindustri, agama harus tetap teguh sebagai kekuatan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman ,Ahmad Shidiq & Rahman Kabi. 1993. *Ba'iat, Satu Prinsip Gerakan islam; Telaah Ba'iat dalam Khilafah dan jamaah. El-Fawas Press. Jakarta: Al- Qardhawy.*
- Al-Maududi, Abyl A'la. 1984. *Khilafah dan Kerajaan. Evaluasi kritis atas sejarah pemerintahan Islam. Mizan. Bandung*
- Saifudin Achmad. F. 2000. *Agama dalam Politik Keseragaman. Jakarta: Departemen Agama RI; Bagian Penelitian dan Pengembangan Agama.*
- Sutana, Ija & Betty Tresnawaty. 2020. *Political Knowlegde and Political Behavior Among Highly Educated Muslims In Indonesia. Journal of Social Studies Education Research, Vol 11, No. 4, hal. 150*
- Syamsuddin M. Din. 2001. *Islam dan Politik Era Orde Baru. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.*
- Tjandrasasmita, Uka (Ed.). 1984. *Sejarah Nasional Indonesia III. Jakarta: PN Balai Pustaka.*
- Yusuf. 1998. *Pedoman bernegara dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka Al - Kautsar.*